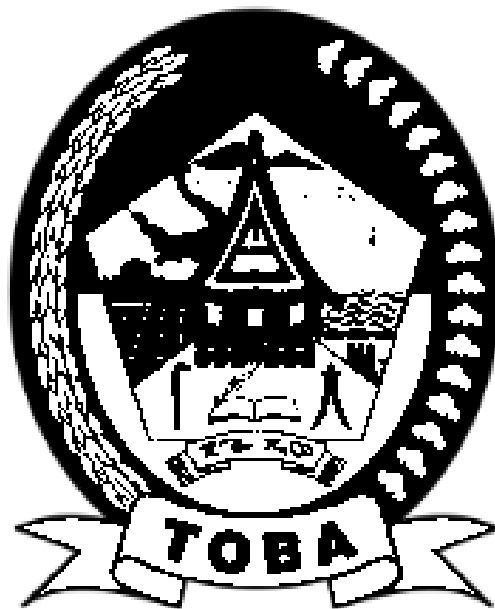


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2024**



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TOBA**

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Hal

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan SKPD.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian.....	2
1.4. Permasalahan Yang Dihadapi.....	10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA11

2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja	11
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024	11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA12

A. CAPAIAN KINERJA OPD	12
3.1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	12
3.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	28
3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	29
B. REALISASI ANGGARAN	29

BAB IV. PENUTUP 32

4.1. Kesimpulan	32
4.2. Upaya dalam Pemecahan Masalah ke depan	32

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil terhadap pengukuran kinerja.

Sasaran strategis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba yang dimuat pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba (RPJPD) adalah : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat dengan Indikator Ketersediaan Energi Perkapita target 5.400 kkal/kapita/hari realisasi 6.597 kkal/kapita/hari capaian 122,16%, Ketersediaan Protein Perkapita target 100 Gram/perkapita/hari realisasi 152,35 Gram/perkapita/hari capaian 152,35%, Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) target 90% realisasi 85,8% capaian 95,33%, Produksi Perikanan target 100% realisasi 91,25% capaian 91,25%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah target B (60,80) realisasi BB (71,50) capaian 117,59%, Penguatan Cadangan Pangan target 15% realisasi 21,68% capaian 144,53%, Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani target 69,23% realisasi 30% capaian 43,33%, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan target 2,86% realisasi 2,86% capaian 100%, Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap target 627,433 ton realisasi 592,704 ton capaian 94,46%, Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya target 1.695,34 ton realisasi 1.526.882 ton capaian 90,06% dan Penunjang kinerja Perangkat Daerah target 100% realisasi 100% capaian 100%. Rata – rata capaian indikator adalah 104,64%.

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba mempunyai Alokasi Anggaran sebesar Rp.4.787.822.507,00 (Empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp.4.394.532.444,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah). Dengan tingkat capaian 98,10% realisasi fisik dan 91,79% Realisasi Keuangan, terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 393.290.063,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam puluh tiga rupiah)

KATA PENGANTAR

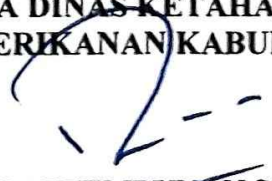
Berdasarkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2014 pasal 4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan dan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati. OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban terhadap anggaran SKPD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba atas Perjanjian Kinerja (PK) TA 2024 yang telah disepakati.

Laporan ini menguraikan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba terhadap tingkat capaian kinerja atas sasaran strategis/arah kebijakan RPJMD, indikator kinerja dalam mencapai target, dan analisa terhadap faktor keberhasilan dan ketidak berhasilan serta pemecahan masalah/solusi dalam pelaksanaan Pembangunan sektor pangan dan perikanan. Selain itu disampaikan laporan keuangan khususnya belanja pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2024 disusun, sebagai pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba atas PK yang telah disepakati.

Balige, Februari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA**


DARWIN PARHIMPUNAN SIANIPAR, S.Pt, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan SKPD

Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Nomor 44 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba, berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) diatas, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang ketahanan pangan dan Perikanan. Dinas Ketahanan Pangan dalam pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Tobadipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan dan Perikanan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir dan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan;

1.2.1 Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

- pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
- b. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
 - d. pemantauan, pengawasan. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3 Struktur Organisasi dan Kepegawaian

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, jabatan pimpinan pratama/eselon II.b;
- b. Sekretaris, jabatan administrator/eselon III.a, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas/eselon IV.a;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, jabatan administrator Publik, jabatan pengawas / eselon IV.a;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, jabatan administrator / eselon III.B, terdiri dari:
 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, jabatan pengawas/ eselon IV.a;
- e. Bidang Perikanan, jabatan administrator/ eselon III.b, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan, jabatan pengawas/ eselon IV.a;

2. Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawas Perikanan jabatan pengawas/eselon IV.a;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Lumban Pea.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
- b. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan panagn dan perikanan;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
- d. pemantauan, pengawasan. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur staf dalam Pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi Kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai Lingkup tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Melaksanakan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- e. Mengelola kepegawaian Dinas Ketahanan dan Perikanan;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Ketahanan Pangan dan perikanan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusipangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

- c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ketersediaan dan Distribusi pangan dalam melaksanakan fungsinya di bantu oleh Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dan Seksi Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya bidang konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Konsumsi pangan, penganevaragaman Konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi

- pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. Menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Seksi penganeekaragaman konsumsi pangan.

Bidang Perikanan

- (1) Bidang Perikanan merupakan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan Bidang Perikanan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
 - b. Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perikanan;
 - c. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perikanan;
 - d. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perikanan;
 - e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perikanan;
 - f. Memberikan bimbingan pascapanen, pengelolaan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
 - g. Memberikan izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perikanan;
 - h. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen

pelaksanaan anggaran Bidang perikanan.

- i. Melakukan perencanaan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja Bidang Perikanan dapat terlaksana dengan baik;
- j. Mengkoordinasikan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun lembaga/instansi terkait di bidang perikanan berdasarkan peraturan yang berlaku agar program kerja terlaksana dengan baik;
- k. Menyelenggarakan program kerja bidang perikanan agar pelaksanaan operasional kegiatan sesuai dengan rencana;
- l. Melaksanakan operasional kegiatan bidang perikanan agar melaksanakan operasional kegiatan sesuai dengan rencana;
- m. Menyelenggarakan pendapatan dan informasi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan ; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
Bidang Perikanan dibantu oleh Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan dan Seksi Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan

Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

- (1) Dinas Ketahanan Pangan memiliki kelompok jabatan tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :
 - a. Jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan dan kerawanan pangan;
 2. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 3. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.
 - b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 2. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;
 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan

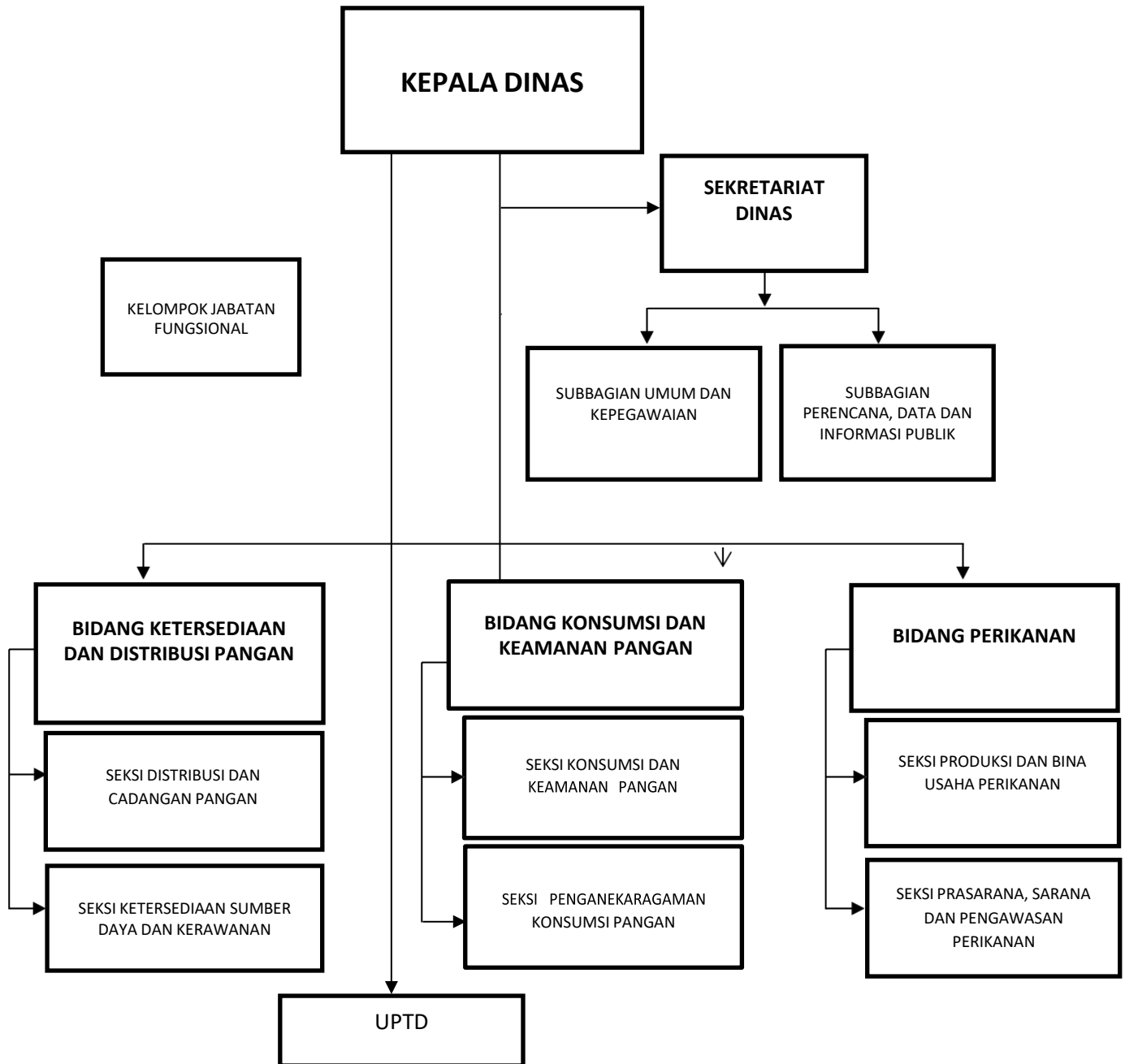
- c. Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugasantara lain;
1. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 2. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 3. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA



1.4 Permasalahan yang dihadapi

- Ketersediaan Pangan hasil produksi daerah selain Beras dan jagung masih mengandalkan pasokan dari luar daerah yang mengakibatkan harga beberapa komoditi Pangan Utama selalu mengalami kenaikan.
- Kekurangan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja adalah pernyataan perjanjian kinerja Atasan (Bupati) dan Bawahan (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan). Kepala SKPD berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, demikian juga sekretaris, setiap kepala bidang, dan kepala seksi melakukan perjanjian atas pencapaian target. Program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang sangat mendukung pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2025 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Program untuk mencapai sasaran strategi

No	Program	Pagu
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.365.961.077,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 178.414.230,00
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 63.561.175,00
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 10.184.740,00
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.169.701.285,00

2.2 PENETAPAN KINERJA 2024

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi /satker. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba Tahun 2024 memuat sasaran strategis, program /kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran (Lampiran I). Sedangkan lampiran II Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Penyusunan PK di susun sesuai petunjuk teknis yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Untuk penyusunan Laporan Kinerja ini kami menjelaskan semua indikator yang ada di RPJMD untuk keselarasan RPJMD dengan Sasaran Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA OPD

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Perikanan Kabupaten Toba pada tahun 2024 dapat dilihat di bawah ini

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.1. Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat

a. Ketersediaan Energi Perkapita

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Ketersediaan Energi Perkapita	5.400 kkl/perkapita/hari	6.597 kkl/perkapita/hari	122,16%

Indikator Ketersediaan Energy Perkapita target 5400 kkl/perkapita/hari realisasi 6.597 kkal/perkapita/hari atau 122,16%. Realisasi Ketersediaan energi ini diperoleh dari kelompok bahan pangan seperti Padi padian 6.147 kkl/perkapita/hari, Makanan Berpati 269 kkl/perkapita/hari, Gula 5 kkl/perkapita/hari, Buah-buahan 43 kkl/perkapita/hari, Sayur – sayuran 57 kkl/perkapita/hari, Daging 39 kkl/perkapita/hari, telur 22 kkl/perkapita/hari, Ikan 15 kkl/perkapita/hari.

Tingginya capaian indikator ini dikarenakan tingginya produksi beberapa kelompok bahan pangan seperti padi - padian 6.147 kkl/perkapita/hari dan makanan berpati 269 kkl/perkapita/hari.

Dasar untuk perhitung Ketersediaan Energy Perkapita adalah hasil produksi yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Toba yang diolah dengan Aplikasi NBM (Neraca bahan Makanan) tahun 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Ketersediaan Energi Perkapita	101,98%	155,9%	122,16%

Indikator Ketersediaan Energy Perkapita Tahun 2022 Target 3640 kk/perkapita/hari Realisasi 3712 kk/perkapita/hari, Tahun 2023 Target 3.728 kk/perkapita/hari Realisasi 5.812 kk/perkapita/hari dan Tahun 2024 Target 5400 kkal/kapita/hari Realisasi 6.596 kk/perkapita/hari.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketersediaan Energi Perkapita	5.096 kk/perkapita/hari	6.206 kk/perkapita/hari	3640 kk/perkapita/hari	3712 kk/perkapita/hari	3.728 kk/perkapita/hari	5.812 kk/perkapita/hari	5400 kk/perkapita/hari	6.597 kk/perkapita/hari	3.962 kk/perkapita/hari	0	4092 kk/perkapita/hari	0

b. Ketersediaan Protein Perkapita

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Ketersediaan Protein Perkapita	100 gram/perkapita/hari	152,35 gram/perkapita/hari	152,35%

Indikator Ketersediaan Protein Perkapita target 100 gram/perkapita/hari realisasi 152,35 gram/perkapita/hari atau 152,35%. Realisasi Ketersediaan Protein ini diperoleh dari kelompok bahan pangan seperti Padi padian 140 gram/perkapita/hari, Makanan Berpati 2 gram/ perkapita/hari, Buah-buahan 1 gram/ perkapita/hari, Sayur – sayuran 3 gram/ perkapita/hari, Daging 2 gram/perkapita/hari, telur 2 gram/perkapita/hari, Ikan 3 gram/ perkapita/hari.

Tingginya capaian indikator ini dikarenakan tingginya produksi beberapa kelompok bahan pangan seperti padi - padian 140 gram/perkapita/hari. Dasar untuk perhitung Ketersediaan Protein Perkapita adalah hasil produksi yang diperoleh **dari Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Toba yang diolah dengan Aplikasi NBM (Neraca bahan Makanan) tahun 2024.**

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Ketersediaan Protein Perkapita	103,59%	155,84%	152,35%

Indikator Ketersediaan Protein perkapita Tahun 2022 Target 87 gram/kapita/hari Realisasi 90,12 gram/kapita/hari Tahun 2023 Target dan 88 gram/kapita/hari Realisasi 137,14 gram/kapita/hari Tahun 2024 target 100 realisasi 152,35 gram/perkapita/hari.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketersediaan Protein Perkapita	239 gram/kapita/hari	164,22 gram/kapita/hari	87 gram/kapita/hari	90,12 gram/kapita/hari	88 gram/kapita/hari	137,14 gram/kapita/hari	100 gram/kapita/hari	152,35 gram/kapita/hari	79 gram/kapita/hari	0	883 gram/kapita/hari	0

c. Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase skor pola pangan harapan	90 %	85,8%	95,33%

Indikator Persentasi skor pola pangan harapan target 90% realisasi 85,8% dengan capaian 95,33%. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen dengan capaian 100% Pagu Anggaran Rp.49.456.200,00 Realisasi Rp.47.886.200,00 dengan capaian 96,82%.

Realisasi di hitung berdasarkan Perhitungan Skor PPH yang bersumber dari beberapa

Kelompok Pangan. Realisasi Skor Pola Pangan Harapan dihitung dari perhitungan kelompok pangan Padi padian 25,0%, Umbi umbian 1,7%, Pangan hewani 24,0%, Minyak dan Lemak 5,0%, Buah/Biji berminyak 1,0%, Kacang-kacangan 5,5%, Gula 1,6%, Sayur dan Buah 22,0%. Pelaksanaan kegiatan survei konsumsi pangan dalam penetapan skor pola pangan harapan (PPH) dilakukan dengan pengambilan data konsumsi pangan masyarakat oleh enumerator di 16 kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing responden dari seriap desa diwakili oleh 10 orang sehingga total responden sebanyak 470 orang, yang menjadi enumerator adalah tenaga Pelaksanaan gizi puskesmas PNS, Non PNS se – kabupaten Toba.

Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Target 1 laporan Realisasi 1 laporan dengan capaian 100% Pagu Anggaran Rp.65.358.930,00 Realisasi Rp.48.670.845,00 dengan capaian 74,46%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian bibit sayuran dan kompos yang sudah diserahkan kepada Masyarakat yang penerimanya adalah Desa Binaan PKK, Kampung sayur, Desa Rawan Pangan, Desa Inovasi dengan rincian sebagai berikut :

- Desa Binaan PKK : Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti, Desa Narumonda I, Kecamatan Siantar Narumonda, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Silaen, Kecamatan Ajibata, Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige.
- Pemanfaatan Pekarangan Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige.

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuisioner PPH oleh Enumerator kepada masyarakat sebanyak 470 orang dan diolah menggunakan **Aplikasi PPH tahun 2024**.

Tidak tercapainya target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan beragam, bergizi dan seimbang.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Persentase Skor Pola Pangan Harapan	95,51 %	95,22 %	95,33 %

Indikator Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022 target 89% Realisasi 85,00%
Tahun 2023 target 90% realisasi 85,7%, Tahun 2024 Target 90% Realisasi 85,8%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Skor Pola Pangan Harapan	89,30%	84,9%	89%	85%	90%	85,7%	90%	85,8%	91%	0	91%	0

Perbandingan antara RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN dari tahun 2022 - 2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	RPJMD Toba			RPJMD PROVINSI			RPJMN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan	Persen	2023	90	85,7	95,2	92,50	87,71	94,8	94	94,1	100,1
		2024	90	85,8	95,3	92,50	89,01	96,22	94	94,1	100,1

d. Produksi Perikanan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Produksi Perikanan	100 %	91,25%	91,25%

Indikator Produksi Perikanan dengan target 100 % Realisasi 91,25% dengan capaian 91,25%. Total Produksi Perikanan Tahun 2024 adalah produksi Perikanan Tangkap 592,704 Ton, Total Produksi Budidaya 1.526,882 ton untuk target daerah sebanyak 2.322,773 ton.
Produksi Perikanan =

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.119,586 \text{ ton}}{2.322,773 \text{ ton}} \times 100\% \\
 &= 91,25\%
 \end{aligned}$$

Sumber data diperoleh dari data yang diperoleh Penyuluh Perikanan dari KUB

(Kelompok Usaha Bersama) dan POKDAKAN (Kelompok pembudidaya ikan) di Kabupaten Toba tahun 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Produksi Perikanan	119,47%	95,95%	91,25%

Indikator produksi perikanan untuk tahun 2022 target 100% realisasi 119,47%, Tahun 2023 target 100% realisasi 95,95%, Tahun 2024 Target 100% Realisasi 91,25%.

Adapun menurunnya capaian dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh menurunnya produksi perikanan budidaya dikarenakan adanya penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba dan menurunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan berkurangnya populasi ikan Red Devil.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Targ et	Real isasi	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Real isasi	Target	Real isasi
Produksi Perikanan	0	0	100%	119,47 %	100%	95,95%	100%	91,25%	100%	0	100%	0

e. Penguatan cadangan Pangan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penguatan Cadangan Pangan	15%	21,68%	144,53%

Indikator Penguatan Cadangan Pangan dengan Target 15% Realisasi 21,68% dengan capaian 144,53%. Penguatan cadangan pangan ini merupakan pengadaan cadangan pangan pemerintah berupa beras yang diperuntukkan untuk penanganan bencana dan gagal panen dan cadangan pangan berupa gabah yang ada di Lumbung Pangan Masyarakat. Penguatan Cadangan Pangan ini dilaksanakan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota sub kegiatan Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Jumlah cadangan pangan beras yang ada di Kabupaten sebanyak 2 ton beras dan jumlah cadangan pangan yang ada di masyarakat sebanyak 19,6853 ton. Cadangan pangan masyarakat yang ada di Lumbung Pangan Masyarakat adalah Kelompok Lumbung Pangan Siantar Tonga-tonga II sebanyak 9,9203 ton dan Kelompok Lumbung Pangan Tani Sehati di Desa Lumban Binanga Kecamatan Uluhan sebanyak 9,765 ton.

Tingginya capaian ini dikarenakan adanya pengadaan cadangan pangan kabupaten sebanyak 2 ton dan tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lumbung pangan desa sehingga tersedianya cadangan pangan masyarakat sebanyak 19,6853 ton.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota}}{100 \text{ ton}} \times 100\% \\
 &= \frac{21,6853 \text{ ton}}{100 \text{ ton}} \times 100\% \\
 &= 21,68\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Penguatan Cadangan Pangan	0 %	0 %	144,53%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Targ et	Real isasi	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Real isasi	Target	Real isasi	Target	Real isasi
Penguatan Cadangan Pangan	0	0	5%	0	10%	0	15%	21,68%	20%	0	25%	0

F. Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	69,23%	30%	43,33%

Indikator Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani target 69,23% realisasi 30% dengan capaian 43,33%. Tahun 2023 Kabupaten Toba berdasarkan Peta Rawan Pangan mempunyai 10 Desa yang Rawan Pangan yaitu Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti (Prioritas 1), Desa Napajoring Kecamatan Nassau (Prioritas 1), Desa Sipagabu Kecamatan Nassau (Prioritas 1), Desa Siboruon Kecamatan Balige (Prioritas 2), Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran (Prioritas 2), Desa Janji Maria Kecamatan Borbor (Prioritas 2), Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau (Prioritas 2), Desa Sibide Kecamatan Silaen (Prioritas 2), Desa Siantar Tonga-tonga III Kecamatan Siantar Narumonda (Prioritas 2), Desa Harungguan Kecamatan Bonatua Lunasi (Prioritas 2). Desa Rawan Pangan yang ditangani hanya 3 Desa yaitu : Desa Siboruon Kecamatan Balige, Desa Harungguan Kecamatan Bonatua Lunasi dan Desa Sipagabu Kecamatan Nassau. Program yang mendukung indikator ini Program Penanganan Kerawanan Pangan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan pagu Rp.63.561.175,00 realisasi Rp.63.498.400,00 dengan capaian 99,90%. Bantuan yang diserahkan kepada 3 Desa Rawan Pangan berupa Beras Medium 2.250 Kg, Biscuit ATB 750 bungkus dan Kacang Hijau 375 kg. Tidak tercapainya target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan beragam, bergizi dan seimbang

Regulasi Penghitungan :

Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani =

$$= \frac{\text{Jumlah desa rawan pangan yang sudah tertangani}}{\text{Jumlah desa rawan pangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ Desa}}{10 \text{ Desa}} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

Sumber data diperoleh dari peta ketahanan dan kerentanan pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) yang disusun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten toba tahun 2023.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	0	52,09%	43,33%

Indikator persentase daerah rawan pangan yang tertangani untuk tahun 2022 target 38,46% realisasi 0%, Tahun 2023 target 53,84% realisasi 28,57%, Tahun 2024 target 69,23% realisasi 30%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Targ et	Real isasi	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Real isasi	Target	Real isasi	Target	Real isasi
Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	0	0	38,46%	0	53,84%	28,57%	69,23%	30%	84,61%	0	100%	0

g. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2,86%	2,86%	100

Indikator Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan Target 2,86% Realisasi 2,86% dengan capaian 100%. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota adalah dengan melakukan pengujian residu pestisida terhadap sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) untuk komoditi sawi manis dan sawi pahit yang dilakukan dengan pengambilan sampel pangan dari kelompok tani. Komoditi sawi manis berasal dari kelompok Tani Habinsaran Desa Lumbanpea Timur Kecamatan Balige dan Komoditi Sawi Pahit berasal dari kelompok Tani Dos Roha Desa Patane IV Kecamatan Porsea dengan hasil pengujian terhadap residu pestisida **DIBAWAH AMBANG BATAS**. Laporan Hasil Uji dikeluarkan oleh PT.Mutuagung Lestari Medan. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pengawasan keamanan Pangan kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota sub

kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota dengan pagu Rp.10.184.740,00 dengan realisasi Rp.7.151.000,00 dengan capaian 70,21%.

Tercapainya indikator ini dikarenakan ada penyesuaian target di P.Renja 2024 yang sebelumnya target 65,70% disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi 2,86%.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah sampel yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{70} \times 100\% \\
 &= 2,86 \%
 \end{aligned}$$

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0 %	4,76 %	100%

Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan untuk Tahun 2022 realisasi 0%. Tahun 2023 target 60% yang diperoleh dari 42 sampel yang aman dikonsumsi dibagi 70 jumlah total sampel yang ditetapkan, realisasi 4,76% yang diperoleh dari 2 sampel yang aman dikonsumsi dibagi 70 sampel yang ditetapkan. Tahun 2024 target 2,86% diperoleh dari 2 sampel yang aman dikonsumsi dibagi 70 sampel yang ditetapkan, realisasi 2,86% diperoleh dari 2 sampel yang aman dikonsumsi dibagi 70 sampel yang ditetapkan.

Tingginya capaian indikator tahun 2024 dari tahun 2023 dikarenakan ada penyesuaian target di P.Renja 2024 yang sebelumnya target 65,70% disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi 2,86%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	0	55,70%	0	60%	2,86%	2,86%	2,86	75,70%	0	85,70%	0

h. Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	627,433 Ton	592,704 Ton	94,46

Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Target 627,433 ton realisasi 592,704 ton dengan capaian 94,46%. Capaian indikator ini diperoleh dari hasil tangkap ikan mas sebanyak 0,44 ton, Ikan Nila : 121,7 ton, Ikan lele : 1,36 ton, Lain-lain : 469,204 ton hasil tangkap dari Danau/Sungai. Data jumlah produksi perikanan ini didapat dari Nelayan atau KUB (Kelompok Usaha Bersama).

Sumber data diperoleh dari data yang diperoleh Penyuluh Perikanan dari KUB (Kelompok Usaha Bersama) di Kabupaten Toba tahun 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	100,92%	96,54%	94,46

Indikator jumlah total produksi perikanan tangkap untuk tahun 2022 target 603,069 ton realisasi 608,642 ton, Tahun 2023 target 615,13 ton realisasi 593,869 ton, Tahun 2024 target 627,433 ton realisasi 592,704 ton.

Menurunnya capaian indikator pada tahun 2024 dikarenakan berkurangnya populasi ikan Red Devil.

i. Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1.695,34 Ton	1.526,882 Ton	90,06

Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya dengan Target 1.695,34 ton realisasi 1.526,882 ton dengan capaian 90,06%. Capaian ini diperoleh dari produksi Ikan

Mas KJA : 2,252 ton Sawah/Kolam : 318,932 ton, Ikan Nikan KJA : 547,69 ton sawah/Kolam : 557,843 ton, Ikan Lele KJA : 55,303 ton Sawah/Kolam : 40,798 ton, Lainnya KJA : 0,125 Sawah/Kolam : 3,939 ton. Program yang mendukung program Pengelolaan Perikanan Budidaya kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp.99.996.285,00 realisasi Rp.77.458.610,00 dengan capaian 77,46%.

Sumber data diperoleh dari data yang diperoleh Penyuluh Perikanan dari POKDAKAN (Kelompok pembudidaya ikan) di Kabupaten Toba tahun 2024.

Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan adanya penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	79,07	95,76	90,06

Indikator jumlah total produksi perikanan budidaya untuk tahun 2022 target 1.598,02 ton realisasi 1.263,6972 ton, Tahun 2023 target 1.645,96 ton realisasi 1.575,641 ton, tahun 2024 target 1.695,34 ton realisasi 1.526,882 ton.

Menurunnya capaian indikator tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 dikarenakan adanya penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba.

3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,80)	BB (71,50)	117,59%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Realisasi	
	2023	2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,45)	BB (71,50)

Menurunnya capaian di tahun 2024 dikarenakan masih terdapat rumusan indikator kinerja pada dokumen PK yang belum cukup menjawab sasaran strategis, belum memenuhi kriteria SMART dan belum berorientasi hasil (outcome), masih merupakan keluaran kegiatan (output) serta target kinerja yang ditetapkan tidak menantang dan tidak mencerminkan suatu hasil yang akan dicapai yaitu indikator produksi perikanan dengan target 100%. Belum sepenuhnya memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk melakukan perubahan/penyesuaian anggaran, aktivitas dan strategi dalam rangka pencapaian target kinerja khususnya terhadap kinerja yang tidak tercapai di tahun sebelumnya dan kinerja tersebut tidak dikerjakan di tahun berjalan. Contohnya pada indikator kinerja “Penguatan Cadangan Pangan” dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 0%.

3.1.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

a. Penunjang Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Indikator ini didukung 1 Program 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target kinerja 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen (100%) dengan anggaran Rp.38.994.335,00 dan realisasi sebesar Rp.37.563.000,00 (96,32%).
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Target kinerja 5 Laporan realisasi 5 Laporan (100%) dengan anggaran Rp. 17.674.713,00 dan realisasi sebesar Rp.16.381.900,00 (92,68%).
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Target kinerja 26 Orang/bulan dan realisasi 27 Orang/bulan (103%) dengan anggaran Rp. 2.628.757.300.00 dan realisasi Rp. 2.617.459.310,00 (99,57%). Capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan adanya penambahan Pegawai di Bulan Desember 2024.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100%) dengan anggaran Rp.19.998.870,00 dan realisasi Rp. 17.109.700,00 (85,55%).
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Target kinerja 4 Paket dan realisasi 4 paket (100%) dengan anggaran Rp. 1.994.430,00 dan realisasi sebesar Rp.1.985.200,00 (99,54%).
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Target kinerja 4 Paket dan realisasi 4 Paket (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 8.991.000,00 dan realisasi sebesar Rp.8.545.000,00 (95,04%).
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Target kinerja 2 Dokumen realisasi 2 dokumen (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.10.000.000,00 (100%).
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target kinerja 12 laporan dan realisasi 12 Laporan (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 199.870.500,00 dan realisasi sebesar Rp.198.539.500,00 (99,33%).
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Target kinerja 2 unit dan realisasi 3 unit (150%) dengan anggaran sebesar Rp. 72.074.520,00 dan realisasi sebesar Rp.51.760.000,00 (71,81%).Tingginya capaian indikator kinerja dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan sangat membutuhkan laptop dan computer.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja 2 Laporan dan realisasi 2 laporan (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 39.999.145,00 dan realisasi sebesar Rp.5.526.000,00 (13,82%), serapan anggaran rendah karena token Listrik kantor masih dalam keadaan cukup.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
Target kinerja 3 laporan Realisasi 3 Laporan (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 194.340.000,00 dan realisasi sebesar Rp.150.300.000,00 (77,34%).

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target kinerja 20 Unit dan realisasi 14 Unit (70%) dengan anggaran sebesar Rp.128.967.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 124.248.037,00 (96,34%).
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Target kinerja 10 Unit dan realisasi 10 Unit (100%). Dengan anggaran sebesar Rp. 4.298.364,00 dan realisasi sebesar Rp.3.862.000,00 (89,85%).

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 :

Indikator	Capaian		
	2022	2023	2024
Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Ketersediaan Energi Perkapita	5.400 kkal/kapita/hari	6.597 kkal/kapita/hari	122,16
Ketersediaan Protein Perkapita	100 Gram/perkapita/hari	152,35 Gram/perkapita/hari	152,35
Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90 %	85,8 %	95,33
Produksi Perikanan	100 %	91,25 %	91,25
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,80)	BB (71,50)	117,59
Penguatan Cadangan Pangan	15 %	21,68 %	144,53
Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	69,23%	30%	43,33

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2,86 %	2,86 %	100
Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	627,433 Ton	592,704 Ton	94,46
Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1.695,34 Ton	1.526.882 Ton	90,06
Penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
Rata-Rata Capaian Indikator			104,64

Capaian Kinerja Program sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja :

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	15%	21,68%	144,53%
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	69,23%	30%	43,33%
	Program Pengawasan keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2,86%	2,86%	100
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	627,433 Ton	592,704 Ton	94,46
	program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1.695,34 Ton	1.526,882 Ton	90,06
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:

Seluruh Kegiatan mendukung target Program. Akan tetapi terdapat capaian kinerja yang lebih 100 % dan juga capaian kinerja yang rendah, sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Energi Perkapita target 5.400 kkl/perkapita/hari realisasi 6.597 kkl/perkapita/hari capaian 122,16%. Tingginya capaian indikator ini dikarenakan tingginya produksi beberapa kelompok bahan pangan seperti padi - padian 6.147 kkl/perkapita/hari dan makanan berpati 269 kkl/perkapita/hari.
- b. Ketersediaan Protein Perkapita target 100 gram/perkapita/hari realisasi 152,35 gram/perkapita/hari capaian 152,35%. Tingginya capaian indikator ini dikarenakan tingginya produksi beberapa kelompok bahan pangan seperti padi - padian 140 gram/perkapita/hari.
- c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah target B (60,80) realisasi BB (71,50) capaian 117,59%, tingginya capaian ini dikarenakan terdapat perubahan strategi dan inovasi dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan terdapat peningkatan capaian kinerja utama.
- d. Penguatan cadangan pangan target 15% realisasi 21,68% capaian 144,53% tingginya capaian ini dikarenakan adanya pengadaan cadangan pangan kabupaten sebanyak 2 ton dan tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lumbung pangan desa sehingga adanya cadangan pangan masyarakat sebanyak 19,6853 ton.
- e. Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target 90% realisasi 85,8% dengan capaian 95,33%. Tidak tercapainya target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan beragam, bergizi dan seimbang.
- f. Produksi perikanan target 100% realisasi 91,25% capaian 91,25% tidak tercapainya indikator ini dikarenakan menurunnya produksi perikanan budidaya dikarenakan adanya penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba dan menurunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan berkurangnya populasi ikan Red Devil.
- g. Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani target 69,23% realisasi 30% capaian 43,33%, rendahnya capaian ini dikarenakan Anggaran yang masih terbatas dari 10 Desa Rawan Pangan yang bisa ditangani hanya 2 Desa.
- h. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan target 2,86% realisasi 2,86% dengan capaian 100%, Indikator ini tidak tercapai dikarenakan keterbatasan anggaran, tercapainya indikator ini dikarenakan ada penyesuaian target di P.Renja 2024 yang sebelumnya target 65,70% disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi 2,86%.
- i. Jumlah total produksi perikanan tangkap target 627,433 ton realisasi 592,704 ton dengan capaian 94,46% tidak tercapainya target dikarenakan menurunnya hasil tangkap nelayan, tidak tercapainya indikator ini disebabkan berkurangnya populasi ikan Red Devil.
- j. Jumlah Total produksi perikanan budidaya target 1.695,34 ton realisasi 1.526,882 ton dengan capaian 90,06%, tidak tercapainya indikator ini dikarenakan adanya penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.

Efisiensi Sumber Daya

Realisasi kinerja tahun 2024 Ketersediaan Energi Perkapita capaian 122,16%, Ketersediaan Protein Perkapita capaian 152,35%, Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) capaian 95,33%, Produksi Perikanan capaian 91,25%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian 117,59%, Penguatan Cadangan Pangan capaian 144,53%, Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani capaian 43,33%, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan capaian 100%, Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap capaian 94,46%, Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya capaian 90,06% dan Penunjang kinerja Perangkat Daerah capaian 100%. Rata – rata capaian indikator adalah 104,64% dibandingkan dengan Anggaran Rp.4.787.822.507,00 realisasi Rp.4.394.532.444,00 capaian 91,79% maka sudah terdapat efisiensi.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba mempunyai Alokasi Anggaran sebesar **Rp.4.787.822.507,00 (Empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah)** dengan Realisasi sebesar **Rp.4.394.532.444,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).**

Dengan tingkat capaian 98,10% realisasi fisik dan 91,79% Realisasi Keuangan, terdapat silpa anggaran sebesar **Rp. 393.290.063,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam puluh tiga rupiah),** Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba secara lebih rinci dapat dilihat pada table :

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis	29.552.300,00	29.537.300,00	99,94
			Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan pangan kabupaten/kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34.046.800,00	31.532.800,00	92,61

		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	49.456.200,00	47.886.200,00	96,82	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	65.358.930,00	48.670.845,00	74,46	
		Program penanganan kerawanan pangan	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	63.561.175,00	63.498.400,00	99,90
		Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	10.184.740,00	7.151.000,00	70,21
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.069.705.000,00	845.517.642,00	79,04
				Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	99.996.285,00	77.458.610,00	77,46
		Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.994.335,00	37.563.000,00	96,32
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.674.713,00	16.381.900,00	92,68
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.628.757.300,00	2.617.459.310,00	99,57
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.998.870,00	17.109.700,00	85,55
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.994.430,00	1.985.200,00	99,54
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.991.000,00	8.545.000,00	95,04
				Penyediaan Bahan	10.000.000,00	10.000.000,00	100

		Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan			
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.870.500,00	198.539.500,00	99,33
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	72.074.520,00	51.760.000,00	71,81
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.145,00	5.526.000,00	13,82
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.340.000,00	150.300.000,00	77,34
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.967.900,00	124.248.037,00	96,34
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.298.364,00	3.862.000,00	89,85

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati, yang memuat tentang evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun Anggaran 2024 rata-rata 104,64% dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.4.787.822.507,00 (Empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah)** dengan Realisasi sebesar **Rp.4.394.532.444,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).**

Dengan tingkat capaian 98,10% realisasi fisik dan 91,79% Realisasi Keuangan, terdapat silpa anggaran sebesar **Rp. 393.290.063,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam puluh tiga rupiah).**

4.2 Upaya Dalam Pemecahan masalah ke depan

Upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah :

1. Dilaksanakannya sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
2. Dibutuhkan anggaran untuk pengadaan bahan pangan pokok seperti beras, telur, gula, minyak goreng, susu untuk anak-anak yang kurang gizi untuk daerah rawan pangan.
3. Diberikan bantuan kepada nelayan berupa alat tangkap, sampan dan melakukan restocking.
4. Melakukan sosialisasi supaya membudidayakan ikan pada kolam atau sawah dan memberikan bantuan seperti Bioflok dan bibit ikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba ini diperbuat, kalua ada usul dan saran perbaikan demi kesempurnaan laporan ini kami terima dengan baik dan diucapkan terima kasih.

Balige, Februari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA**



**DARWIN PARHIMPUNAN SIANIPAR S.Pt, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARWIN PARHIMPUNAN SIANIPAR, S.Pt, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. POLTAK SITORUS

Jabatan : Bupati Toba

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balige, 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI TOBA

Ir. POLTAK SITORUS

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TOBA

DARWIN PARHIMPUNAN SIANIPAR, S.Pt, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601229 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Perkapita	5400 kkal/kapita/hari
		Ketersediaan Protein Perkapita	100 gram/kapita/hari
		Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90 %
		Produksi Perikanan	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (satuan: Nilai)	B(60,80)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3.228.260.577,00	APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 178.414.230,00	APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 63.561.175,00	APBD
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 10.184.740,00	APBD
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 962.201.285,00	APBD



PIHAK KEDUA
BUPATI TOBA

D. BULAK SITORUS

KEPALA DINAS PERTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TOBA

DARWIN PACHMURRAN SIANIPAR, S.Pt, M.Si
PENYERA UTAMA MUDA
NIP. 19851229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA
Jln. Tarutung Km. 2 Saposurung – Balige

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TOBA
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA
PERIODE 2021 - 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang** : Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/156/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 (lembaran daerah kabupaten toba tahun 2021 nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA.
- PERTAMA** : Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten toba, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal

Maret 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA

DARWIN PARTHOMPUNAN SIANIPAR, S.Pt, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691229 199603 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA
PERIODE 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing - masing kelompok pangan	Persen	-	89%	90%	90%	91%	91%	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ketersediaan energi (kkl/kapita/hari): $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{EDD}}{100}$	kkl/kapita/hari dan gram/kapita/hari	-	3640/ 87	3728/88	3864/89	3962/79	4092/83	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3	Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	Persen	-	100	100	100	100	100	Bidang Perikanan

**PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN
ENERGI, PROTEIN DAN LEMAK PER KAPITA PER HARI
TAHUN 2024**

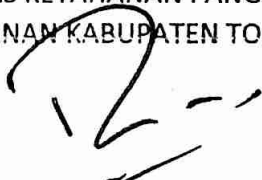
Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Ha	Protein (Gram/Hari	Lemak (Gram/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	6.147	140	48
Makanan berpati	269	2	1
Gula	5	0	0
Buah biji berminyak	0	0	0
Buah-buahan	43	1	2
Sayur-sayuran	57	3	1
Daging	39	2	3
Telur	22	2	2
Susu	-	-	-
Ikan	15	3	0
Minyak dan Lemak	0	0	0

Total	6.597	152,35	56,08
Nabati	6.544	145,62	51,19
Hewani	79	7,11	5,28

KETERANGAN

"**") Rumput Laut masuk kelompok ikan.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TOBA


DARWIN P SIAMPAR, S.Pt. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Tarutung KM 2 Soposurung – Balige

PENGUATAN CADANGAN PANGAN

$$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten/Kota}}{100} = \frac{21.6853 \text{ ton}}{100}$$
$$= 21,68 \%$$

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA**

DARWIN P. SIANIPAR, S.Pt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Tarutung KM 2 Soposurung – Balige

❖ **CADANGAN PANGAN DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT**

Cadangan Pangan Daerah : 2 ton

Cadangan Pangan Masyarakat :

1. Data Lumbung Pangan di Kelompok Lumbung Pangan Tani Sehati = 1.738 kaleng = 19.118 kg gabah (9.765 ton beras)
(terlampir data dari Kelompok Tani Sehati, Desa Lumban Binanga, Kec. Uluan)

***KONVERSI PADI KE BERAS**

✓ Padi/ gabah di kelompok lumbung pangan tani sehati, Kec. Uluan = 19.118 kg

✓ Konversi Padi ke Beras

- $GKP \text{ ke } GKG = 86,02 \% \times 19.118 \text{ kg} = 16.445 \text{ kg}$
- $Bibit = 0,9 \% \times 16.445 \text{ kg} = 148 \text{ kg}$
- $GKG \text{ tersedia} = 16.445 - 148 = 16.297 \text{ kg}$
- $Kehilangan, \text{ susut, pakan} = 6,4 \% \times 16.297 \text{ ton} = 1.043 \text{ kg}$
- $GKG \text{ total} = 16.297 \text{ kg} - 1.043 \text{ kg} = 15.254 \text{ kg}$
- $Konversi \text{ GKG ke beras} = 64,02 \% \times 15.254 = 9.765 \text{ kg} = 9,765 \text{ ton}$

2. Data Lumbung Pangan di Kelompok Lumbung Pangan Siantar Tonga-Tonga II = 1.765,5 kaleng
= 19.420,5 kg gabah

***KONVERSI PADI KE BERAS**

✓ Padi/ gabah di Kelompok Lumbung Pangan Siantar Tonga-Tonga II = 19.420,5 kg gabahs

✓ Konversi Padi ke Beras

- $GKP \text{ ke } GKG = 86,02 \% \times 19.420,5 \text{ kg} = 16.705,51 \text{ kg}$
- $Bibit = 0,9 \% \times 16.705,51 \text{ kg} = 150,34 \text{ kg}$
- $GKG \text{ tersedia} = 16.705,51 - 150,34 = 16.555,17 \text{ kg}$

- Kehilangan, susut, pakan = $6,4 \% \times 16.555,17 \text{ ton} = 1.059,53 \text{ kg}$
- GKG total = $16.555,17 \text{ kg} - 1.059,53 \text{ kg} = 15.495,64 \text{ kg}$
- Konversi GKG ke beras = $64,02 \% \times 15.495,64 = 9.920,30 \text{ kg} = 9,9203 \text{ ton}$

Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat : $2 \text{ ton} + 9,765 \text{ ton} + 9,9203 = 21,6853 \text{ ton}$

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA



DARWIN P. SIANIPAR, S.Pt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Tarutung KM 2 Soposurung – Balige

Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani :

$$\frac{\text{Jumlah desa rawan pangan yang sudah tertangani}}{\text{Jumlah Desa rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2023}} = \frac{3 \text{ Desa}}{10 \text{ Desa}} \times 100\%$$
$$= 30 \%$$

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TOBA**

DARWIN P. SIANIPAR, S.Pt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001

Penanganan Daerah Rawan Pangan TA. 2024

No	Desa	Kecamatan	Jumlah Penerima	Volume/Satuan	Jenis Bantuan
1	Siboruon	Balige	25 KK	750 kg 250 bungkus 125 kg	Beras Medium Biscuit ATB Kacang Hijau
2	Harungguan	Bonatua Lunasi	25 KK	750 kg 250 bungkus 125 kg	Beras Medium Biscuit ATB Kacang Hijau
3	Sipagabu	Nassau	25 KK	750 kg 250 bungkus 125 kg	Beras Medium Biscuit ATB Kacang Hijau

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA


 DARWIN P. SIANGIPAR, S.Pt., M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19691229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Tarutung KM 2 Saposurung – Balige

DAFTAR DESA RAWAN PANGAN BERDASARKAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2023

No.	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Meranti Tengah	Pintu Pohan Meranti	Desa Rawan Pangan Prioritas 1
2.	Napajoring	Nassau	Desa Rawan Pangan Prioritas 1
3.	Sipagabu	Nassau	Desa Rawan Pangan Prioritas 1
4.	Siboruan	Balige	Desa Rawan Pangan Prioritas 2
5.	Panamparan	Habinsaran	Desa Rawan Pangan Prioritas 2
6.	Janji Maria	Borbor	Desa Rawan Pangan Prioritas 2
7.	Lumban Rau Timur	Nassau	Desa Rawan Pangan Prioritas 2
8.	Sibide	Silaen	Desa Rawan Pangan Prioritas 2
9.	Siantar Tonga-Tonga III	Siantar Narumonda	Desa Rawan Pangan Prioritas 2
10.	Harungguan	Bonatua Lunasi	Desa Rawan Pangan Prioritas 2

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA**



DARWIN P. SIAMPAR, S.Pt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
JL. TARUTUNG KM 2. SOPOSURUNG - BALIGE

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2024

Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi
di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai
standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu

$$\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$$

Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan
pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran
yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA**



DARWIN P. SIANIPAR, S.Pt, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
JL. TARUTUNG KM 2. SOPOSURUNG - BALIGE

SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

No	Jenis Pangan Segar Yang Diuji	Asal Pangan Segar Yang Diuji	Tahun Pengujian	Hasil Pengujian
1	Sawi Manis	Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige	2024	Memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar
2	Sawi Pahit	Desa Patane IV Kecamatan Porsea	2024	Memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar

Dari 2 jenis sampel yang diuji diperoleh hasil bahwa nilai residu pestisida pada kedua jenis bahan pangan tersebut berada di bawah batas maksimum yang menunjukkan bahwa kedua jenis sampel memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar.

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA**



DARWIN P. SIANIPAR, S.Pt, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001

LAPORAN HASIL UJI
REPORT OF TESTING**Nomor Seri. : 0914 / FOOD / VII/ 24**
Serial Number**Halaman 1 dari 2**
Page of

Tanggal Penerimaan Contoh
Date of Received : 05 Agustus 2024

Tanggal Pelaksanaan Analisis
Date of Analysis : 06 - 19 Agustus 2024

Tempat Pengujian
Testing Place : Laboratorium Analisa Umum dan Pangan

Jenis Contoh
Sample Type : Sawi

Kuantitas
Quantity : 1 Kg

Untuk Analisis
Tested for : Kimia

Deskripsi / Kondisi Contoh
Description / Condition of Sample : Dikemas dengan plastik

Nama dan Kontak Pelanggan
Contact and Customer Name : Kelompok Tani Habinsarah

Alamat Pelanggan
Customer Address : Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Metode Pengambilan Contoh
Method of Sampling : -

Nama dan Kontak Penyuplai Contoh
Name and Contact of Supplier Sample : UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

COPY**Diterbitkan Di Depok Tanggal, 19 Agustus 2024****Date of Issue**
LELI NURFAEL**Manager Teknis****Laboratorium Analisa Umum dan Pangan**

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
HASIL UJI Test Result

Sample Identification	Parameter	Unit	Reporting Limit	Result	BMR / BMR ²	Method
(0478) Sawi	Residues of Organophosphate Pesticide :					
	- Methyl Tolcofos	mg/kg	0.025	< 0.025	2	UJI-PNG 024 (GC - FPD)
	- Methyl Chlorpyrifos	mg/kg	0.025	< 0.025	0.1	UJI-PNG 024 (GC - FPD)
	- Diazinon	mg/kg	0.025	< 0.025	0.5	UJI-PNG 024 (GC - FPD)
	- Dimethoate	mg/kg	0.025	< 0.025	2	UJI-PNG 024 (GC - FPD)

¹Batas Maksimum (BMR/BMC) sesuai Peraturan RI No.53/PERMENTANKR.040/12/2018, Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Diperiksa Oleh :
Checked By



Penyelia
Laboratorium Analisa Umum dan Pangan

LAPORAN HASIL UJI
REPORT OF TESTING**Nomor Seri. : 0913 / FOOD / VIII/ 24**
Serial Number**Halaman 1 dari 2**
Page of

Tanggal Penerimaan Contoh : 05 Agustus 2024
Date of Received

Tanggal Pelaksanaan Analisis : 06 - 19 Agustus 2024
Date of Analysis

Tempat Pengujian : Laboratorium Analisa Umum dan Pangan
Testing Place

Je Contoh : Sewi Pahit
Sample Type

Kuantitas : 1 Kg
Quantity

Untuk Analisis : Kimia
Tested for

Deskripsi / Kondisi Contoh : Dikemas dengan plastik
Description / Condition of Sample

Nama dan Kontak Pelanggan : Kelompok Tani Dos Roha
Contact and Customer Name

Alamat Pelanggan : Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Customer Address

Metode Pengambilan Contoh : -
Method of Sampling

Nama dan Kontak Penyuplai Contoh : UPTD Perindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan
Name and Contact of Supplier Sample Mutu Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara

COPY**Diterbitkan Di Depok Tanggal, 19 Agustus 2024****Date of Issue**
LELI NURLAELI**Manager Teknis****Laboratorium Analisa Umum dan Pangan**

This Report may not be reproduced Except in full, without written approval of the Company.

This Report refer to the tested sample only. All tests are carried out to the best of our knowledge and ability and our responsibility is limited to the correctness of the result. This report is issued on the understanding that it does not relieve parties concerned from their contractual obligation.

UJI-4003c/1.5/30082023

Sample Identification	Parameter	Unit	Reporting Limit	Result	EMR / BMC ¹⁾	Method
(0477) Sawi Pahit	Residues of Organophosphate Pesticide :					
	- Methyl Tolclofos	mg/kg	0.025	< 0.025	2	UJI-PNG 024 (GC - FPD)
	- Methyl Chlorpyrifos	mg/kg	0.025	< 0.025	0.1	UJI-PNG 024 (GC - FPD)
	- Diazinon	mg/kg	0.025	< 0.025	0.5	UJI-PNG 024 (GC - FPD)
	- Dimethoate	mg/kg	0.025	< 0.025	2	UJI-PNG 024 (GC - FPD)

Batas Maksimum (EMR/BMC) sesuai Peraturan RI No.53/PERMENTAN/KR.040/12/2018, Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Diperiksa Oleh :
Checked By



Penyelia
Laboratorium Analisa Umum dan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
JL. TARUTUNG KM. 2 SOPOSURUNG – BALIGE

email : distapang@tobakab.go.id

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Toba Tahun 2024

Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Toba Tahun 2024							
No	Komoditi	Wadah	Triwulan				Total
			I	II	III	IV	(Ton)
1	Ikan Mas	Danau /Sungai	0,1	0,12	0,14	0,08	0,44
2	Ikan Nila		29,7	32	31,4	28,6	121,7
3	Ikan Lele		0,33	0,32	0,42	0,29	1,36
4	Lainnya		120,218	116,314	119,286	113,386	469,204
Total			150,348	148,754	151,246	142,356	592,704



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
JL. TARUTUNG KM. 2 SOPOSURUNG – BALIGE
email : distapang@tobakab.go.id

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Toba Tahun 2024

No	Komoditi	Wadah	Triwulan				Total
			I	II	III	IV	(Ton)
1	Ikan Mas	KJA	1,1	0,55	0,3	0,302	2,252
		Sawah/Kolam	105,62	46,33	62,41	104,572	318,932
2	Ikan Nila	KJA	164,00	69,18	57,78	256,73	547,69
		Sawah/Kolam	194,4	82,903	110,94	169,6	557,843
3	Ikan Lele	KJA	15,8	15,843	15,71	7,95	55,303
		Sawah/Kolam	11,3	6,827	12,36	10,311	40,798
4	Lainnya	KJA	0,03	0,045	0,05		0,125
		Sawah/Kolam	1,95	0,71	1,2	0,079	3,939
Total			494,2	222,388	260,75	549,544	1.526,882



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Sutomo Pagar Batu, Balige, Sumatera Utara 22312
Telp. (0632) 322100, Faksimile (0632) 322100
Laman www.tobakab.go.id, Pos-el setda@tobakab.go.id

Balige, 13 Mei 2024

Nomor : 700.04/112/IRDA/LHE/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba
di
Balige

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Toba Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;



3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama PD dengan menyajikan informasi menyajikan formulasi/perhitungan capaian kinerja, definisi operasional, target kinerja tahunan dan sumber data kinerja.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja, khususnya untuk target yang telah tercapai melebihi target di tahun berikutnya.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi Tahun 2023.
4. Melaksanakan pengukuran kinerja yang telah diperjanjikan Tahun 2023.

C. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba menunjukkan nilai sebesar 71,50 dengan predikat

BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon III/koordinator.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30%	24,60	24,50
b. Pengukuran Kinerja	30%	21,00	16,25
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,85	11,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	15,00	19,00
Nilai hasil evaluasi	100%	72,45	71,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Toba, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah memiliki seluruh dokumen perencanaan kinerja dan anggaran antara lain RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama PD, RKA PD dan DPA. Namun demikian masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat indikator kinerja pada tingkat Eselon II yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan target kinerja yang ditetapkan tidak menantang, yakni indikator kinerja "Produksi Perikanan" dengan target kinerja 100%.
- Dokumen Rencana Aksi belum menyajikan informasi aktivitas yang akan dilaksanakan pada setiap periode dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
- Dokumen IKU PD yang telah disusun belum menyajikan informasi definisi operasional atas indikator kinerja.
- Cascading/penjenjangan* kinerja yang telah disusun belum berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yakni belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical succes factor* dalam penyusunannya.

- e. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai, Hal ini ditunjukkan dengan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi secara berkala pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Pengukuran Kinerja

Pada level pemerintah daerah, pengukuran kinerja yang telah dilakukan belum sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai. Namun demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerjanya, pengukuran kinerja yang dilakukan telah didukung dengan pedoman teknis/SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang menjadi catatan, diantaranya:

- a. Pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara berkala yakni belum melaksanakan pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2024.
- b. Belum terdapat rekomendasi pimpinan terhadap hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan untuk melakukan perubahan/penyesuaian anggaran, aktivitas dan strategi dalam rangka pencapaian target kinerja khususnya terhadap kinerja yang tidak tercapai di tahun sebelumnya dan kinerja yang tidak *on the right track* di tahun berjalan. Contohnya pada indikator kinerja "Penguatan Cadangan Pangan" dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 0%. Atas ketidakberhasilan tersebut, manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak melakukan penyesuaian anggaran dan bahkan mengurangi anggaran yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja tersebut.
- c. Pengumpulan data kinerja dalam rangka pengukuran kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menyusun dan memformalkan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023. Disamping itu, laporan kinerja dimaksud telah direviu oleh APIP dan rekomendasi hasil reviu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yang diantaranya sebagai

berikut:

- a. Laporan kinerja yang telah disusun belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga belum berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan perubahan budaya kinerja organisasi.
- b. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya penetapan target kinerja yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup yakni:

No	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023 (LKJ 2023)	Target Kinerja Tahun 2024 (PK 2024)
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/kapita/hari dan gram/kapita/hari	5812 dan 137,14	5400 dan 100

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Toba telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024 terhadap seluruh perangkat daerah (43 PD) yang salah satunya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Evaluasi telah dilaksanakan dengan membentuk Tim Evaluator yang terdiri dari unsur pejabat struktural pada unit kerja yang membidangi perencanaan, pengawasan (APIP), organisasi dan tata laksana serta melibatkan pejabat fungsional perencana, analis kebijakan, PPUPD dan auditor. Disamping itu, rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 yakni:

- a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam peningkatan implementasi SAKIP dan perbaikan kinerja serta belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

1. Melakukan perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II dengan menetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART serta menetapkan target kinerjanya yang realistis dan menantang.
2. Melakukan perbaikan dokumen Rencana Aksi dengan menambahkan informasi aktivitas yang akan dilaksanakan pada setiap periode dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
3. Melakukan perbaikan dokumen IKU PD dengan menambahkan informasi definisi operasional atas indikator kinerja.
4. Memperbaiki dokumen *cascading*/penjenjangan kinerja dengan memastikan kualitas *cascading*/penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala (per triwulan).
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi secara berkala dan memanfaatkan hasil monev untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan untuk melakukan perubahan/penyesuaian anggaran, aktivitas dan strategi dalam rangka pencapaian target kinerja khususnya terhadap kinerja yang tidak tercapai di tahun sebelumnya dan kinerja yang tidak *on the right track* di tahun berjalan.
8. Berkoordinasi dengan PD terkait dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam melaksanakan pengukuran kinerja.
9. Melibatkan dan mengkomunikasikan informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai serta mendorong terciptanya komitmen dan kepedulian seluruh pegawai dalam upaya peningkatan capaian kinerja yang ditetapkan.
10. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja untuk melakukan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
11. Melakukan penyesuaian target pada dokumen Perjanjian Kinerja, khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja pada dokumen Laporan Kinerja tahun



sebelumnya.

12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memanfaatkannya untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Inspektur Kabupaten Toba dengan melampirkan dokumen Matriks Tindak Lanjut dan bukti-bukti penyelesaian tindak lanjut selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



AUGUS SITORUS

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.
2. Bupati Toba.